

**PERANAN DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PEMBERIAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai  
salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**TOMI KATRISMAN  
TM/NIM : 2009/97306**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

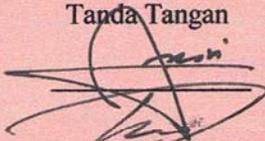
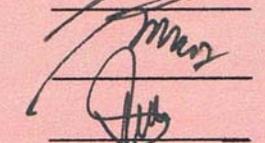
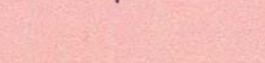
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Kamis, 2 Januari 2014 pukul 15.00 s/d 16.30 WIB

### Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas

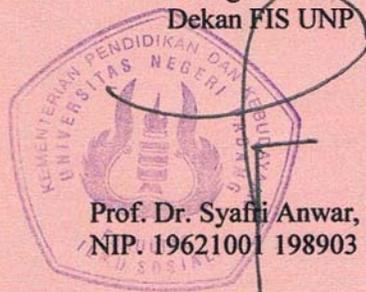
Nama : Tomi Katrisman  
TM/NIM : 2009/97306  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 2 Januari 2014

#### Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Jumiaty, M.Si	
Sekretaris	: Zikri Alhadi, S.IP, MA	
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	

Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syaffi Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## **ABSTRAK**

### **TOMI KATRISMAN : NIM. 97306/2009. Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas adalah memproses perizinan sesuai dengan alur perizinan. Hal ini terlihat dari kegiatan menerima surat permohonan, pengecekan kelengkapan dokumen perusahaan yang mengajukan permohonan, melakukan survey lokasi guna menentukan status lahan dan kajian lingkungan wilayah pertambangan, melakukan plot peta untuk menentukan titik koordinat wilayah pertambangan, dan memproses draf SK Bupati melalui bagian hukum sekretariat daerah sampai penyerahan surat keputusan IUP yang sudah ditanda tangani bupati kepada pemohon.(2) Kendala yang dihadapi Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) emas yaitu, belum adanya PERDA yang mengatur tentang pertambangan di Kabupaten Solok Selatan. Wilayah pertambangan yang berada dalam kawasan hutan dan berada disepanjang aliran sungai. Sehingga susah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan pertambangan.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERANAN DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS**”. Salawat dan salam dimohonkan kepada-Nya untuk dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana satu (S1) dengan gelar Sarjana Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Negeri Padang yang memberikan bimbingan dan masukan dalam penelitian ini.
4. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si. sebagai pembimbing akademis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Dra. Jumiati, M.Si.selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Zikri Alhadi S.IP . MA selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. IbuDra. Al Rafni, M.Si.selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini
9. Ibu Lince Magriasti, S.IP., M.Si.selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini
10. Seluruh staf pengajar FIS UNP khususnya staf pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNP.
11. Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan, perusahaan tambang emas dan masyarakat yang telah memberikan data penelitian.
12. Teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara UNP khususnya angkatan 2009 terima kasih atas segala kebaikannya.
13. Semua teman-teman yang telah memberi dukungan moril menyelesaikan skripsi ini

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan dalam penulisan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Khazanah Ilmu Pengetahuan yang penulis miliki.

Padang, Januari 2014

**Tomi Katrisman**

## HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis.....	8
1. Konsep peranan.....	8
a. Pengertian peranan.....	8
b. Peranan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan.....	11
2. Konsep perizinan.....	11
a. Pengertian izin.....	11
b. Unsur-unsur perizinan.....	12
c. Bentuk dan isi izin.....	13
d. Fungsi dan tujuan izin.....	13
e. Prosedur penerbitan izin.....	14
3. Mineral dan Energi.....	15
4. Pertambangan.....	17
5. Kendala dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.....	22
B. Kerangka Konseptual .....	24

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	
B. Lokasi Penelitian ....	v
C. Informan Penelitian .....	27

D. Jenis Data.....	28
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	33
1. Temuan Umum.....	33
a. Gambaran Umum Dinas ESDM.....	33
b. Sejarah umum Dinas ESDM Solok Selatan.....	33
c. Visi dan Misi Dinas ESDM Solok Selatan.....	35
d. Struktur organisasi Dinas ESDM Solok Selatan.....	37
e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ESDM Solok Selatan.....	40
2. Temuan Khusus.....	54
a. Peranan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.....	54
1. Investor Mengajukan Permohonan.....	54
2. Pengecekan Kelengkapan Dokumen.....	55
3. Melakukan Survey Lokasi.....	57
4. Meminta Rekomendasi dari Dinas HutBun dan Lingkungan Hidup.....	66
5. Melakukan Plot Peta.....	61
6. Proses Perizinan.....	62
b. Kendala yang dihadapi Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.....	63
B. Pembahasan.....	66
1. Peranan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.....	66
2. Kendala yang dihadapi Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	vi	.....
B. Saran.....		.....

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

**DAFTAR BAGAN**

vii

Bagan 1 . Kerangka Konseptual..... 25

Bagan 2. Struktur Organisasi Dinas ESDM Solok Selatan..... 39

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar kajian lingkungan dan status lahan perusahaan pemegang IUP emas.....	60
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil.

Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai potensi bahan galian adalah Kabupaten Solok Selatan. Solok Selatan memiliki banyak potensi pertambangan umum. Diantara potensi pertambangan umum yang ada di Solok Selatan, yang memiliki nilai ekonomis adalah dari golongan komoditas mineral logam diantaranya, biji besi, mangan, tembaga, dan emas. Pengelolaan sektor pertambangan umum harusnya jadi prioritas di Kabupaten Solok Selatan supaya memberikan manfaat yang maksimal baik untuk masyarakat maupun Pemerintah daerah.

Keluarnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri (otonomi) sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

di daerah tersebut. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah otonom akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya. (Widjaja 2004 : 7)

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah, Pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah. Dasar hukum yang mengatur tentang perangkat daerah terdapat dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah, terdapat pada pasal 120 yang berbunyi “perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan”.

Dalam bidang pertambangan, Khususnya pertambangan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, telah memberi kewenangan pada Pemerintah daerah untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara. Penyerahan wewenang kepada Pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan umum agar menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah terdapat dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di Wilayah Kabupaten/Kota dan /atau Wilayah laut sampai dengan (4) mil. Disini jelas bahwa Pemerintah pusat memberikan wewenang pada Pemerintah daerah untuk mengelola bidang pertambangan yang ada di daerah tersebut, jadi Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin terhadap masyarakat atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan pemahaman diatas perangkat daerah yang mengatur tentang kegiatan pertambangan umum di Kabupaten Solok Selatan adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dinas tersebut merupakan bagian dari satuan

kerja perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan. Dinas Energi Sumber Daya Mineral merupakan instansi otonom daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dan energi. Oleh karena itu, Dinas Energi Sumber Daya Mineral harus mampu menjalankan peranannya dengan baik dalam mengelola pertambangan umum, khususnya pertambangan emas.

Di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan Hasil observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 18 Oktober 2012 yang mana penulis mewawancarai Kepala Bidang Pertambangan Umum yaitu Bapak Feri Yuredi, beliau mengatakan bahwa:

Kabupaten Solok Selatan masih kurang tenaga inspektur tambang untuk pengawasan pertambangan. Inspektur tambang yang ada saat ini berjumlah 2 orang dan belum memiliki sertifikat kerja. Pada hal untuk Kabupaten Solok Selatan dibutuhkan minimal 5 inspektur tambang yang memiliki sertifikat,

Berdasarkan wawancara diatas diperoleh data bahwa masih terdapat masalah dalam mengelola pertambangan emas. Indikasi masalah lain yaitu, masih minimnya izin pertambangan emas yang dikeluarkan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan. Perusahaan pemegang IUP tidak melakukan kegiatan penambangan. Perusahaan tambang yang berproduksi saat ini sering melakukan penambangan diluar batas izin wilayah yang ditentukan. Kemudian terkendalanya akses dari dinas ESDM menuju lokasi pertambangan emas, yang menyebabkan kurang lancarnya proses pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang.

Masalah lain dalam mengelola pertambangan emas di Solok Selatan yaitu masalah perizinan pertambangan rakyat. Masyarakat disekitar wilayah tambang yang sudah secara turun temurun melakukan penambangan sebagai mata pencaharian belum memiliki izin. Proses pemberian izin yang cukup rumit menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus izin. Sehingga banyak terjadi praktek *illegal mining* atau penambang tanpa izin (PETI) di Solok Selatan.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bidang Pertambangan Umum Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat masalah-masalah dalam mengelola pertambangan emas. Diantaranya adalah masih kurangnya inspektur tambang yang ada di Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan, masih minimnya izin pertambangan emas yang dikeluarkan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan, kemudian lemahnya pengawasan terhadap izin usaha pertambangan emas, kurangnya pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang. dan lokasi pertambangan rakyat yang belum memiliki izin. Sehingga kegiatan usaha pertambangan emas di Solok Selatan belum memberikan hasil yang maksimal baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Berdasarkan paparan di atas, maka dilakukan pengkajian tentang **“Peranan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih kurangnya inspektur tambang pada Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan
2. Masih minimnya izin pertambangan emas yang dikeluarkan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan
3. Perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melakukan kegiatan penambangan
4. Masih kurangnya pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan emas
5. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang
6. Pertambangan rakyat yang belum memiliki izin

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya aspek yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada peranan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas dan kendala yang dihadapi dalam pemberian izin usaha pertambangan.

## **D. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana peranan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan emas.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis  
Secara teoritis, mamfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan Administrasi perizinan.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai masukan bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pemberian izin usaha pertambangan.
  - b. Sebagai referensi bagi peneliti lain, untuk keperluan serupa atau untuk menambah wawasan tentang izin pertambangan umum khususnya tambang emas.